



KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 17 /K/ 2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA,

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), perlu menetapkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam hal :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dalam tahun berjalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat atau menarik usulan yang telah tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, maka usulan penambahan dan penarikan tersebut dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanpa harus melakukan perubahan/penambahan/pengurangan terhadap Keputusan ini.

- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan DPRD ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara pada Perangkat Daerah pengusul Ranperda.
- KETUJUH** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 23 Desember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
Ketua,

  
BASKAMI GINTING

*Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :*  
- Gubernur Sumatera Utara ;

**RESOLUSI DAN RANGKAIAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

**NOMOR : 17 / K / 2020**

**TANGGAL : 23 DESEMBER 2020**

**TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021.**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021**

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RANPERDA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	RANPERDA TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM	Usulan Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara
2.	RANPERDA TENTANG TATA BATAS DAN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara
3.	RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Usulan Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara
4.	RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Usulan Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara
5.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan DPRD Komisi E Provinsi Sumatera Utara
6.	RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
7.	RANPERDA TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
8.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
9.	RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

10.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
11.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
12.	RANPERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
13.	RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

**DAFTAR RANCANGAN PERDA KUMULATIF TERBUKA**

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RANPERDA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2.	Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
3.	Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

**DAFTAR RANCANGAN PERDA PROPEMPERDA TAHUN 2020 YANG  
SUDAH DALAM TAHAPAN PEMBAHASAN UNTUK DILANJUTKAN PADA  
TAHUN 2021 (CARRY OVER)**

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RANPERDA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	RANPERDA TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2.	RANPERDA TENTANG TATA CARA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara
3.	RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
4.	RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN	Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara
5.	RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
6.	RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERKEBUNAN SUMATERA UTARA	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

7.	RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DHIRGA SURYA SUMTERA UTARA	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
8.	RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN ANEKA INDUSTRI DAN JASA SUMATERA UTARA	Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**K e t u a,**

**MASKAMI GINTING**